

ABSTRAK

Nama : Karto Kurniawan
NPM : 2202021028
Program Studi : Pascasarjana Magister Kenotariatan

Tantangan dan tuntutan global untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi menjadi tanggung jawab pemerintah dalam upaya memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga mempengaruhi perkembangan hubungan antar warga negara. Dalam situasi masyarakat dunia yang demikian, instrumen hukum perjanjian internasional menjadi suatu hal yang sakral. Pemerintah Indonesia dapat mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dengan berbagai cara, salah satunya dengan akses. Diharapkan suatu perjanjian internasional akan menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia. ketika perjanjian tersebut berlaku bagi Indonesia. Kemudahan berusaha sebagai sebuah subjek utama dalam pembangunan ekonomi harus didorong melalui berbagai aspek prosedur administrasi, salah satunya adalah penghapusan persyaratan legalisasi dokumen publik asing. Kehadiran Apostille menambah peranan notaris sebagai pejabat umum penyelenggara negara dalam bidang hukum. Penelitian ini membahas tentang pentingnya Indonesia sebagai peserta Konvensi Apostille. Perlu penegasan kembali tentang peran perwakilan RI di luar negeri bagi legalisasi dokumen publik yang berasal dari luar negeri. Masih perlu sosialisasi legalisasi Apostille secara lebih luas. Peraturan Permenkum HAM Nomor 6 Tahun 2022 perlu ditindaklanjuti dengan ratifikasi menjadi Undang-Undang.

Kata Kunci: Konvensi Apostille, Notaris, Legalisasi Dokumen

ABSTRACT

Name : Karto Kurniawan
Study Program : Master of Notary
Title : *The Sovereignty Aspects Enactment Of The Apostille Convention In The Regulation Of The Minister Of Law And Human Rights Of The Number 6 Of 2022 (Analysis Of The Notaries Role For Legalization Of Apostille Public Document)*

Global challenges and demands to accelerate economic development are the responsibility of the government in an effort to promote the welfare of society. This also affects the development of relations between citizens. In such a situation of the world community, the legal instruments of international treaties become sacred. The Indonesian government can bind itself to an international treaty in various ways, one of which is by accession. It is expected that an international agreement will become positive law applicable in Indonesia when the agreement applies to Indonesia. Ease of doing business as a key subject in economic development should be encouraged through various aspects of administrative procedures, one of which is the elimination of foreign public document legalization requirements. The presence of Apostille adds to the role of notary as a public official of state administration in the field of law. This research discusses the importance of Indonesia as a participant in the Apostille Convention. It is necessary to reaffirm the role of Indonesian representatives abroad for the legalization of public documents originating from abroad. There is still a need for wider socialization of Apostille legalization. Permenkum HAM Regulation Number 6 of 2022 needs to be followed up with ratification into law.

Keywords : *Apostille Convention, Notary, Document Legalization*